

**LAPORAN
KEUANGAN
BP3TKI BANDUNG
(BP3MI JAWA BARAT)**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022



Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40275
Telpon/Fax : 022-7336965/7333212
E-mail : bp3mi.jabar@bp2mi.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung (BP3MI Jawa Barat) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung (BP3MI Jawa Barat) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung (BP3MI Jawa Barat). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Januari 2023

ERWIN RACHMAT, S.I.K.
KOMBES POL. NRP 71110259

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung (BP3MI Jawa Barat) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, Januari 2023


Kepala
ERWIN RACHMAT, S.I.K.
KOMBES POL. NRP. 71110259

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung (BP3MI Jawa Barat) Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara untuk Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp65.564.339 atau mencapai 0,00 persen. BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat) tidak ada estimasi Anggaran Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.406.660.457 atau mencapai 98.85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.539.136.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.885.389.585 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp111.163.973; Aset Tetap (netto) sebesar Rp11.774.225.612 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp427.306.477 dan Rp11.458.083.108.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.197.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp11.827.962.026 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp11.818.765.026. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp17.867.339

dan Rp11.800.897.687. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp11.800.897.687.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp11.895.403.177 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp Rp11.800.897.687 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.363.577.618 sehingga Ekuitas Entitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp11.458.083.108.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BP3TKI BANDUNG (BP3MI JAWA BARAT) LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Anggaran	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	65,564,339	0.00	106,410,318
JUMLAH PENDAPATAN		-	65,564,339	0.00	106,410,318
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	4,157,616,000	4,142,105,341	99.63	4,006,492,419
Belanja Barang	B.3	7,331,520,000	7,215,055,116	98.41	8,885,739,879
Belanja Modal	B.4	50,000,000	49,500,000	0.00	66,892,963
JUMLAH BELANJA		11,539,136,000	11,406,660,457	98.85	12,959,125,261

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR BP3TKI BANDUNG (BP3MI JAWA BARAT)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	111,163,973	138,747,773
JUMLAH ASET LANCAR		111,163,973	138,747,773
ASET TETAP			
Tanah	C.2	8,573,442,000	8,573,442,000
Peralatan dan Mesin	C.3	5,643,601,198	5,618,622,198
Gedung dan Bangunan	C.4	3,387,336,167	3,337,836,167
Akumulasi Penyusutan	C.5	(5,830,153,753)	(5,642,521,133)
JUMLAH ASET TETAP		11,774,225,612	11,887,379,232
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TuntuTan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.6	73,084,772	98,084,772
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	(73,084,772)	(75,584,772)
<i>Piutang Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	C.8	-	22,500,000
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	22,500,000
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.9	-	996,045,506
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.10	-	(982,545,506)
JUMLAH ASET TETAP		-	13,500,000
JUMLAH ASET		11,885,389,585	12,062,127,005
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	427,306,477	166,723,828
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		427,306,477	166,723,828
JUMLAH KEWAJIBAN		427,306,477	166,723,828
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	11,458,083,108	11,895,403,177
JUMLAH EKUITAS		11,458,083,108	11,895,403,177
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11,885,389,585	12,062,127,005

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BP3TKI BANDUNG (BP3MI JAWA BARAT) LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	9,197,000	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		9,197,000	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		9,197,000	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	4,196,216,348	4,155,614,042
Beban Persediaan	D.3	123,591,020	148,037,200
Beban Barang dan Jasa	D.4	5,622,376,413	6,272,615,577
Beban Pemeliharaan	D.5	353,250,111	391,095,170
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,349,893,014	2,078,126,668
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	185,135,120	278,966,888
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(2,500,000)	2,315,000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		11,827,962,026	13,326,770,545
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN		(11,818,765,026)	(13,326,770,545)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	30,200,999	82,125,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	13,500,000	83,160,000
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		16,700,999	(1,035,000)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	1,166,340	12,285,318
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non - Operasional		17,867,339	11,250,318
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(11,800,897,687)	(13,315,520,227)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(11,800,897,687)	(13,315,520,227)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BP3TKI BANDUNG (BP3MI JAWA BARAT) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
EKUITAS AWAL	E.1	11,895,403,177	12,138,208,461
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(11,800,897,687)	(13,315,520,227)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	11,363,577,618	13,072,714,943
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(437,320,069)	(242,805,284)
EKUITAS AKHIR	E.5	11,458,083,108	11,895,403,177

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BP3TKI Bandung

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung sebelumnya disebut Balai Antar Kerja Antar Negara (**BALAI AKAN**) yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 23 Tahun 1984, Kemudian berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep- 137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Setelah adanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 sesuai amanat UU No. 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2019 sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen dengan Visi **“Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi BP2MI sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
2. Meningkatkan pelayanan penempatan TKI yang mudah, murah, cepat, dan aman;
3. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan TKI;
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem

Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BP3TKI Bandung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BP3TKI Bandung adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan secara khusus direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapata-LO pada BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP / TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP / TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pertama Kali

Mulai Tahun 2015 Pemerintah Mengimplementasikan Akuntansi berbasis AkruaI sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per September 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akruaI. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akruaI pada tahun 2019 adalah merupakan implementasi pertama.

(9) Capaian *output* strategis Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung.

Selama periode yang berakhir 30 Desember 2022, *output* strategis yang telah dicapai oleh Satker Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah sebagai berikut :

No.	Kode	Uraian Output	Alokasi	Realisasi	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran
1.	EAF. 001	Sosialisasi dan Diseminasi	1,129,765,000	1,113,662,859	98.57	2.950	2.950
2.	EBA.962	Layanan Umum	621,935,000	609,718,941	98.04	1	1
3.	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	50.000.000	49.500.000	99,00	1	1
4.	QAA. 003	Pelayanan penempatan PMI oleh pemerintah	386,360,000	385,530,425	99.79	10.000	12.356
5.	QAA. 004	Pelayanan Pelindungan terhadap PMI	381,120,000	343,611,372	90.16	130	104
6.	QAA. 005	Pemberdayaan PMI purna & keluarganya	58,510,000	55,161,779	94.28	20	20
7.	EBA. 994	Layanan Perkantoran	9,311,185,000	8,844,235,473	99.25	1	1

(10) Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 di Satker Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Satker Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung melakukan Refocussing kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut :

1. Penyediaan Belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp129.272.094.

No.	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket.
1.	522192	Beanja Barang Operasiona – Penanganan Pandemi COBID-19				
		Disinfentan	4.000.000	3.661.830	338.170	
		Masker	21.500.000	18.920.000	2.580.000	
		Hand Sanitizer	14.400.00	14.360.850	39.150	
		Vitamin dan Penambah daya tahan tubuh Terken COVID	1.050.000	940.000	110.000	
		Vitamin dan Penambah daya tahan tubuh Pegawai	47.300.000	47.097.728	202.272	
2.	522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19				
		Tes Swab Antigen	34.500.000	29.143.000	5.357.000	
		Tes Swab PCR	18.000.000	15.148.686	2.851.314	

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya *Refocussing* dan pemotongan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yang merubah anggaran DIPA awal pada Tahun Anggaran 2022 BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja Pegawai	4,557,355,000	4,157,616,000
Belanja Barang	8,382,910,000	7,331,520,000
Belanja Modal	50,000,000	50,000,000
Jumlah Belanja	12,990,265,000	11,539,136,000

Revisi tersebut berupa pemutakhiran data revisi POK dan Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dan *Automatic Adjustmet*. Adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yang merubah anggaran DIPA awal pada Tahun Anggaran 2022 BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Revisi Pagu Anggaran Belanja Barang TA. 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran		Penambahan/
		Semula	Menjadi	Pengurangan
1	Belanja Pegawai	4,557,355,000	4,157,616,000	(399,739,000.00)
2	Belanja Operasional	2,752,550,000	2,713,651,000	(38,899,000.00)
3	Belanja Barang Non Operasional	1,843,350,000	1,027,703,000	(815,647,000.00)
4	Belanja Barang Persediaan	82,600,000	96,300,000	13,700,000.00
5	Belanja Jasa	2,079,200,000	1,739,002,000	(340,198,000.00)
6	Belanja Pemeliharaan	281,700,000	356,950,000	75,250,000.00
7	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,343,510,000	1,397,914,000	54,404,000.00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,000,000	50,000,000	-
	Jumlah	12,990,265,000	11,539,136,000	1,451,129,000.00

B. 1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp65.564.339 atau mencapai 0,00 persen. Tidak ada estimasi pendapatan yang di tetapkan pada BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat). Pendapatan BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat) berasal dari penerimaan Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	65,564,339	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	65,564,339	-

Pendapatan penerimaan dengan rincian terdiri dari :

No	Uraian	NTB	NTPN	Jumlah
1	Pengembalian Bel. Barang TAYL	000051767322	5893F3CIF174N21D	1,166,340
2	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	220107385377	A1E390N9VHG1KUNA	1,000,000
3	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	220208312253	139B1JNFC5E80LN	1,000,000
4	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	220308245120	FD26448VURVIGMQ0	1,000,000
5	Sewa Ruangan BP3MI Jabar	058559888012	3EAD31JNFC93HPPV	9,197,000
6	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	220407580749	7A5816U8EBPN7B0B	1,000,000
7	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	220510740392	2EAB22G4V70Q3O2C	1,000,000
8	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	220608775717	7A6007QLU6I2QUEO	1,000,000
9	Lelang BMN (Peralatan & Mesin)	000000264914	276D661QUHDLP3NQ	30,200,999
10	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	220707427332	7C0F27QLU6L0FDH0	1,000,000
11	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	220805816384	3FC398N3E1AAEPK5	1,000,000
12	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	220907223313	A14F01JNFCQ9UKQ5	1,000,000
13	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	221007714661	2E6E57QLU6TUGLNM	1,000,000
14	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	221108776628	AE0EA0N9VIDS2PE2	1,000,000
15	Tuntutan Ganti Rugi an. Ismail U	221108776723	7C49B6U8ECEIUR8P	14,000,000
Jumlah				65,564,339

Realisasi Pendapatan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami kenaikan 521,66 persen dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan pendapatan dari hasil lelang BMN, TGR Piutang lancar setiap bulan dan angsuran pembayaran TGR serta Penerimaan Kembali Belanja Pegawai/Barang TAYL pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyelesaian TGR	25,000,000	12,000,000	108.33
Penerimaan TAYL	1,166,340	12,285,318	0.00
Pendapatan dari Pemindahan BMN	30,200,999	82,125,000	(63.23)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung & Bangunan	9,197,000	-	0.00
Jumlah	65,564,339	24,285,318	169.98

Realisasi Belanja
Negara
Rp11.406.660.457

B. 2 Belanja

Realisasi Belanja BP3MI Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp11.406.660.457 atau 98,85 persen dari anggaran belanja sebesar Rp11.539.136.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Tahun Anggaran 2022

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4,157,616,000	4,143,030,733	99.65%
Belanja Barang	7,331,520,000	7,215,055,116	98.41%
Belanja Modal	50,000,000	49,500,000	99.00%
Total Belanja Kotor	11,539,136,000	11,407,585,849	98.86%
Pengembalian Belanja	-	(925,392)	-100.00%
Jumlah	11,539,136,000	11,406,660,457	98.85%

Dibandingkan periode 31 Desember 2022 realisasi belanja periode yang berakhir belanja pada tahun sebelumnya 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 11,98 persen dibandingkan realisasi dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Kenaikan Pangkat, KGB pegawai dan Tunjangan Fungsional;
2. Penambahan kegiatan operasional unit pos layanan di Kab./Kota di Jawa Barat, tidak ada kegiatan PMI Purna Tahun 2022, Penambahan program sosialisasi penempatan dan perlindungan CPMI dan Kegiatan Pemberdayaan PMI dan Keluarga;
3. Adanya Pemotongan Anggaran *Automatic Adjustment*.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan periode yang berakhir 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4,142,105,341	4,006,492,419	3.38
Belanja Barang	7,215,055,116	8,885,739,879	(18.80)
Belanja Modal	49,500,000	66,892,963	100.00
Jumlah	11,406,660,457	12,959,125,261	(11.98)

*Belanja Pegawai
Rp4.142.105.341*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.142.105.341 dan Rp4.006.492.419. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,38 persen dari realisasi belanja pada TA. 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pembayaran Tukin THR dan Ke-13 Tunjangan Kinerja
2. Adanya Penambahan pegawai yang aktif dari Tugas belajar

Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan TA. 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 DES 2022	REALISASI PER 31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,147,056,528	2,238,654,974	(4.09)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,284	32,991	(11.24)
Belanja Uang Makan PNS	272,979,000	268,931,000	1.51
Uang Lembur PNS	57,735,000	48,500,000	19.04
Tunjangan Kinerja PNS	1,665,230,921	1,457,170,432	14.28
Jumlah Belanja Kotor	4,143,030,733	4,013,289,397	3.23
Pengembalian Belanja Pegawai	(925,000)	(6,796,978)	(86.39)
Jumlah Belanja	4,142,105,733	4,006,492,419	3.38

*Belanja Barang
Rp7.215.055.116*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan TA. 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.215.055.116 dan Rp8.885.739.879. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan 18,80 persen

dari Realisasi Belanja Barang TA. 2021. Hal ini disebabkan adanya kegiatan Pemberdayaan PMI Purna, Kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI yang tahun sebelumnya kegiatan tersebut tidak terealisasi karena Pandemi Covid dan *Refocussing* anggaran, sehingga belanja jasa, biaya perjalanan dinas dan barang konsumsi menurun cukup signifikan dan Belanja Pemeliharaan untuk mengefisienkan sisa anggaran diakhir tahun.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan TA. 2021

URAIAN	Untuk periode yang berakhir 31 Des 2022	Untuk periode yang berakhir 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,603,636,613	2,774,752,332	(6.17)
Belanja Barang Operasional -Pen.Pandemi Covid-19	84,980,408	90,961,500	(6.58)
Belanja Barang Non Operasional	1,003,988,690	1,184,019,368	(15.21)
Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Covid-19	0	189,438,200	(100.00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	96,007,220	147,162,850	(34.76)
Belanja Jasa	1,679,007,374	2,030,183,791	(17.30)
Belanja Jasa-Penangana Pandemi COVID-19	44,291,686	0	100.00
Belanja Pemeliharaan	353,250,111	391,095,170	(9.68)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,349,893,014	2,078,126,668	(35.04)
Jumlah Belanja	7,215,055,116	8,885,739,879	(18.80)
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	7,215,055,116	8,885,739,879	(18.80)

Rincian Belanja Barang Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2022

AKUN	URAIAN	VOL	PAGU ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	PENYERAPAN %
4587.EBA.002.H.521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19				
	Disinfektan	16 GRGN	4,000,000	3,661,830	91.55
	Masker	860 ORG	21,500,000	18,920,000	88.00
	Hand Sanitizer	450 BTL	14,400,000	14,360,850	99.73
	Vitamin dan Penambah Daya Tah	1 PKT	1,050,000	940,000	89.52
	Vitamin dan Penambah Daya Tah	86 PKT	47,300,000	47,097,728	99.32
	Jumlah		88,250,000	84,980,408	96.30
4587.EBA.002.H.522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19				
	Biaya Tes Antigen	230 ORG	34,500,000	29,143,000	84.47
	Biaya Test PCR	60 ORG	18,000,000	15,148,686	84.16
	Jumlah		52,500,000	44,291,686	84.37
	Jumlah Output		140,750,000	129,272,094	91.85
	TOTAL SEMUA		140,750,000	129,272,094	91.85

Belanja Modal
Rp49.500.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp49.500.00 dan Rp66.892.963. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu untuk periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 35,14 persen dibandingkan Tahun 2021. Dalam hal ini disebabkan BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat) merealisasikan belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan Tahun 2021

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	66,892,963	(100.00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	49,500,000	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	49,500,000	66,892,963	100.00
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	49,500,000	66,892,963	-35.14

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan

Rp111.163.973

C.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp111.163.973 dan Rp138.747.773.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Persediaan	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
Barang Konsumsi	111,163,973	138,747,773
Jumlah	111,163,973	138,747,773

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah Rp8.573.442.000

C.2. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat) Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.573.442.000 dan Rp8.573.442.000, tidak ada mutasi tanah pada tahun 2022.

Tanah seluas 943,00 M² terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 587 Rt.03 Rw.09 Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA. 2022

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	943 m2	Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287	8.573.442.000
Jumlah			8.573.442.000

Peralatan dan Mesin

Rp5.643.601.198

C.3. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp5.643.601.198 dan Rp5.618.622.198. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	5,618,622,198
Mutasi Tambah:	24,979,000
Pembelian	0
Transfer masuk	24,979,000
Reklasifikasi masuk	0
Mutasi Kurang:	0
Extrakomptable	0
Reklasifikasi keluar	0
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	
Saldo per 31 Desember 2022	5,643,601,198
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-5,391,040,397
Nilai Buku per 31 Desember 2022	252,560,801

➤ Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa :

- Aset Tetap Yang digunakan transaksi transfer masuk peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp24.979.000 :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Kipas Angin	1	Rp 4,999,000	Rp 4,999,000	BA.09/KWS1-KPB/PL.03.07/2022, tanggal 02-08-2022
2	Komputer Lainnya (Anjungan Informasi Mandiri)	1	Rp 19,980,000	Rp 19,980,000	BA.651/SU-PLI/PL.03.08/VII/2022 tanggal 01-07-2022
JUMLAH				Rp 24,979,000	

C.4. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah Rp3.387.336.167 dan Rp3.337.836.167.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	3,337,836,167
Mutasi tambah :	49,500,000
Pembelian	49,500,000
Revaluasi	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2022	3,387,336,167
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(439,113,356)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2,948,222,811

Adanya transaksi pembelian yaitu penambahan nilai Gedung dan Bangunan BP3TKI Bandung yaitu berupa kanopi dan logo BP2MI sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor : B.304/BP3TKI-6/II/2022 tanggal 05 Februari 2022.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp5.830.153.753) dan (Rp5.642.521.133). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8,573,442,000	0	8,573,442,000
2	Peralatan dan Mesin	5,643,601,198	5,391,040,397	252,560,801
3	Gedung dan Bangunan	3,387,336,167	439,113,356	2,948,222,811
	Akumulasi Penyusutan	17,604,379,365	5,830,153,753	11,774,225,612

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp73.084.772

C.6. Piutang Tagihan TP/TGR

Saldo Tagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp73.084.772 dan Rp98.084.772. Rangkuman Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Tagihan TP/TGR	73,084,772	98,084,772	(25.49)
Jumlah	73,084,772	98,084,772	(25.49)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
(Rp73.084.772)

C.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp73.084.772 dan Rp75.584.772. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang macet karena pihak CV. Nugraha Pratama sudah tidak membayar piutang TGR tersebut dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	30 Des 2022	31 Des 2021	kenaikan (penurunan)
Jangka Panjang	73,084,772	75,584,772	-3.31
Jumlah	73,084,772	75,584,772	-3.31

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/TGR
(Netto) Rp0

C.8. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp22.500.000.

Rangkuman Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2022 tersaji pada table berikut :

Rincian Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenalkan (Penurunan)
Tagihan TP/TGR (Netto)	-	22,500,000	(1,002.00)
Jumlah	-	22,500,000	(100.00)

C.9. Aset Lain-lain

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp996.045.506. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	996,045,506
Mutasi tambah:	-
- Reklasifikasi dari Aset tetap	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	996,045,506
Akumulasi Penyusutan	996,045,506
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sejumlah Rp996.045.506.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp982.545.506. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun. Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	-	982,545,506	(982,545,506)
Jumlah	-	982,545,506	(982,545,506)

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp427.306.477

C.11. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp427.306.477 dan Rp166.723.828. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BP3TKI Bandung (BP3MI Jawa Barat) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Uang Makan PNS Bulan Desember 2022	21,949,000	Pagu tidak mencukupi karena pemotongan
2	Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember 2022	135,408,032	Pagu tidak mencukupi karena pemotongan
3	Kekurangan Gaji 2022	46,200,000	Pagu tidak mencukupi karena SK Keluar Desember
4	Kekurangan Gaji PPh 2022	335,250	Pagu tidak mencukupi karena SK Keluar Desember
5	Listrik Bulan Desember 2022	7,051,392	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2022
6	Telepon Desember 2022	570,494	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2022
7	Internet Desember 2022	5,648,109	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2022
8	Honor Instruktur OPP	153,000,000	Pagu tidak mencukupi
9	Konsumsi OPP	57,025,000	Pagu tidak mencukupi
10	Air PDAM Desember 2022	119,200	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2022
	Jumlah	427,306,477	

Ekuitas
Rp11.458.083.108

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.458.083.108 dan Rp11.895.403.171. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp9.197.000

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp9.197.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA.2022 dan 2021

URAIAN	2022	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	9,197,000	0	100.00
Jumlah	9,197,000	0	100.00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dari BPJ Ketenagakerjaan PMI selama periode Tahun 2022.

Beban Pegawai
Rp4.196.216.348

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.196.216.348 dan Rp4.155.614.042. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2022	31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,704,125,080	1,784,776,680	(4.52)
Beban Pembulatan Gaji PNS	28,892	32,593	(11.36)
Beban Tunjangan-Tunjangan	488,541,698	446,848,562	9.33
Beban Uang Makan	272,891,000	290,968,000	(6.21)
Beban Lembur	57,735,000	48,500,000	19.04
Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja)	1,672,894,678	1,584,488,207	5.58
Jumlah	4,196,216,348	4,155,614,042	0.98

Beban Persediaan
Rp123.591.020

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp123.591.020 dan Rp148.037.200. Beban Persediaan merupakan Beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2022	31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	123,591,020	148,037,200	(16.51)
Jumlah	123,591,020	148,037,200	(16.51)

Beban Barang
dan Jasa
Rp5.622.376.413

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.622.376.413 dan Rp6.272.615.577. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena kenaikan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi disebabkan bertambahnya pengiriman surat dinas pos pusat, belanja bahan naik karena pelaporan secara *offline* sehingga pengadaan dan penjlidan cukup banyak, honor operasional satuan kerja terealisasi karena dilaksanakannya kegiatan sosialisasi. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2022	31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2,445,919,493	2,620,211,332	(6.65)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,037,120	8,549,000	(29.38)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	151,680,000	145,992,000	3.90
Beban Barang Operasional - Penangan Covid-19	84,980,408	90,961,500	(6.58)
Beban Bahan	913,223,700	943,362,905	(3.19)
Beban Honor Output Kegiatan	0	6,500,000	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	147,789,990	234,156,463	(36.88)
Beban Barang Non Operasional - Penangan Covid-19	0	189,438,200	(100.00)
Beban Langganan Listrik	164,026,754	165,950,088	(1.16)
Beban Langganan Telepon	7,843,959	13,351,267	(41.25)
Beban Langganan Air	602,900	255,000	136.43
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	66,182,803	65,673,340	0.78
Beban Jasa Sewa	1,261,797,600	1,539,164,482	(18.02)
Beban Jasa Profesi	328,000,000	249,050,000	31.70
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	44,291,686	0	100.00
Jumlah	5,622,376,413	6,272,615,577	(10.37)

Adapun rincian beban barang dan jasa untuk keperluan Covid-19 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022

No	Beban	Anggaran	Realisasi
a	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		
1	Disinfektan	4,000,000	3,661,830
2	Masker	21,500,000	18,920,000
3	Hand Sanitizer	14,400,000	14,360,850
4	Vitami dan Penambah daya tahan tubuh Terken COVID	1,050,000	940,000
5	Vitami dan Penambah daya tahan tubuh Pegawai	47,300,000	47,097,728
	Jumlah		84,980,408

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022

No	Beban	Anggaran	Realisasi
b	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		
1	Test Swab Antigen	34,500,000	29,143,000
2	Test Swab PCR	18,000,000	15,148,686
	Jumlah		44,291,686

Beban
Pemeliharaan
Rp353.250.111

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp353.250.111 dan Rp391.095.170. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan karena alokasi anggaran pemeliharaan dan sebagian besar dari tahun sebelumnya dan Aset yang dipelihara lebih banyak karena dampak dari kerusakan sehingga perlu perbaikan. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	186,172,500	87,475,100	112.83
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167,077,611	303,620,070	(44.97)
Jumlah	353,250,111	391,095,170	(9.68)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.349.893.014

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.349.893.014 dan Rp2.078.126.668. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas karena bertambahnya kegiatan sosialisasi Peluang Kerja dan Migrasi Aman. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	735,215,073	1,113,327,602	(33.96)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	493,650,000	842,370,000	(41.40)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52,332,000	0	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68,695,941	122,429,066	(43.89)
Jumlah	1,349,893,014	2,078,126,668	(35.04)

Beban
Penyusutan Dan
Amortisasi
Rp185.135.120

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp185.135.120 dan Rp278.966.888. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	114,250,468	207,734,236	(45.00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	70,884,652	69,894,652	1.42
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	1,338,000	(100.00)
Jumlah Penyusutan	185,135,120	278,966,888	(33.64)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	185,135,120	278,966,888	(33.64)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(2.500.000)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(2.500.000) dan Rp2.315.000. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	(2,500,000)	2,315,000	(207.99)
Jumlah	(2,500,000)	2,315,000	(1.08)

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp13.500.000

D.9 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.13.500.000 dan Rp83.160.000. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar TA 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	13,500,000	83,160,000	0.16
Jumlah	13,500,000	83,160,000	0.16

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp1.166.340

D.10 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.166.340 dan Rp12.285.318. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN PENDAPATAN dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	1,924,500	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1,166,340	10,360,000	0.11
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,166,340	12,284,500	0.09

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp11.895.403.177

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas untuk pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.11.895.403.177 dan Rp12.138.208.461.

Defisit LO

Rp11.800.897.687

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp11.800.897.687 dan Rp13.315.520.227. Defisit LO merupakan selisih penjumlahan antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Transaksi Antar

Entitas

Rp11.363.577.618

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.11.363.577.618 dan Rp13.072.714.943. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 DES 2022	31 DES 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	11,406,660,457	12,959,125,261
Diterima Dari Entitas Lain	(65,564,339)	(106,410,318)
Transfer Masuk Aset Tetap	22,481,500	220,000,000
Jumlah	11,363,577,618	13,072,714,943

E.3.1 Diterima dari Entitas Lainnya (DDEL/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 DKEL sebesar Rp11.406.660.457 dan Rp12.959.125.261 sedangkan DDEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar (Rp65.564.339).

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL, KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.481.500 dan Rp220.000.000 terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai	
			31 DES 2022	31 DES 2021
1	Mobil Ambulance	Sekretaris Utama BP2MI	0	220,000,000
2	Peralatan dan Mesin	Sekretaris Utama BP2MI	22,481,500	0
Jumlah			22,481,500	220,000,000

Tidak ada transfer keluar untuk periode berakhir 31 Desember 2022 karena tidak ada perpindahan Aset maupun Persediaan.

Ekuitas Akhir

Rp11.458.083.108

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.458.083.108 dan Rp11.895.403.177.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang tercatat setelah tanggal neraca

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tuntutan Ganti Rugi berupa kelebihan pembayaran konsumsi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) CPMI atas nama CV. Nugraha Pratama sebesar Rp73.084772.

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Akrual belanja pegawai berupa kekurangan gaji, uang makan, tunjangan kinerja dan belanja barang berupa honor istruktur OPP, Konsumsi OPP, Listrik, Internet, Telepon dan PDAM

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah Bank BRI *Virtual Account* nomor : 652824263551000 a.n. BPG BP3TKI BANDUNG.

Surat Pengesahan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung dari KPPN Bandung I sesuai surat Nomor : S-297/WPB.13/KP.0121/2011 tanggal 24 Januari 2011.

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor: Nomor 831 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2023.

KANTOR BP3TKI BANDUNG
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN
AKUMULASI PENYUSUTAN DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

NO	KODE	ASSET TETAP	MASA MANFAAT	NILAI PEROLEHAN	AK. PENYUSUTAN PER 31-12-2022	BEBAK PENY. 31-12-2022	AKM. PENY. PER 31-12-2022	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	132111	PERALATAN DAN MESIN		5.643.601.198	5.391.040.397	0	5.391.040.397	252.560.801
2	3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	1.369.687.000	1.196.829.858	0	1.196.829.858	172.857.142
3	3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4	66.435.000	66.435.000	0	66.435.000	0
4	3.05.01	ALAT KANTOR	5	658.824.000	658.824.000	0	658.824.000	0
5	3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	1.505.623.475	1.496.382.043	0	1.496.382.043	9.241.432
6	3.06.01	ALAT STUDIO	5	226.950.000	221.233.100	0	221.233.100	5.716.900
7	3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	133.752.610	133.752.610	0	133.752.610	0
8	3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	59.400.000	54.665.000	0	54.665.000	4.735.000
9	3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5	11.979.000	7.187.400	0	7.187.400	4.791.600
10	3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	48.322.864	39.897.324	0	39.897.324	8.425.540
11	3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	1.179.040.099	1.147.231.912	0	1.147.231.912	31.808.187
12	3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	383.587.150	368.602.150	0	368.602.150	14.985.000
13	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		3.387.336.167	439.113.356	0	439.113.356	2.948.222.811
14	4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	3.387.336.167	439.113.356	0	439.113.356	2.948.222.811
Jumlah Akm. Penyusutan Aset Tetap				9.030.937.365	5.830.153.753	-	5.830.153.753	3.200.783.612

*Beban Amortisasi

Bandung, Januari 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran
 BP3TKI Bandung

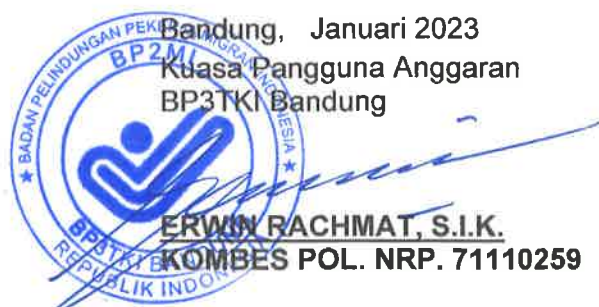
 ERWIN RACHMAT, S.I.K.
 KOMPRES DOI. NRP. 71110259

Lampiran A2

**BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(BP3TKI) BANDUNG
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

BA /UAPA : 104 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 Eselon 1/UAPPA-E1 : 01 Sekretariat Utama BP2MI
 UAPPA-W : 0200 Propinsi Jawa Barat
 Satuan Kerja/UAKPA : 426355 BP3TKI Bandung

No	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akrual	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 1,166,340	Rp -	Rp -	Rp 1,166,340	Bukti Billing dan NTB
2	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
3	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
4	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
5	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp 9,197,000	Rp -	Rp -	Rp 9,197,000	Bukti Billing dan NTB
6	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
7	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
8	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
9	425129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp 30,200,999	Rp -	Rp -	Rp 30,200,999	Bukti Billing dan NTB
10	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
11	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
12	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
13	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
14	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Bukti Billing dan NTB
15	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 14,000,000	Rp -	Rp -	Rp 14,000,000	Bukti Billing dan NTB
JUMLAH			Rp 65,564,339	Rp -	Rp -	Rp 65,564,339	

Bandung, Januari 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran
 BP3TKI Bandung

ERWIN RACHMAT, S.I.K.
 KOMBES POL. NRP. 71110259

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2022**

Kode dan Nama UAKPA : (426355) Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung
 Kode dan Nama UAPPAW : (0200) Jawa Barat
 Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Sekretariat Utama BP2MI
 Kode dan Nama K/L : (104) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
a.	Pagu/DIPA		√	Tidak
b.	Estimasi PNB		√	Tidak
c.	Belanja		√	Tidak
d.	Pengembangan Belanja		√	Tidak
e.	Pendapatan		√	Tidak
f.	Pengembangan Belanja		√	Tidak
g.	Kas BLU		√	Tidak
h.	Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
i.	Kas Hibah		√	Tidak
j.	Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak

		Ya	Tidak	Seharusnya
	Rekon Internal			
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tisi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Hibah Langsung			
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk		√	Ya/Tidak
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bemilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√	Ya/Tidak
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandungkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bemilai desimal		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bemilai positif kecuali beban penylisihan piutang	√		Ya
5	Bandungkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bemilai desimal?		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak

3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	Ya	Tidak	Seharusnya Tidak
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P				
1	Terdapat saldo negatif di LRAB	Ya	Tidak	Seharusnya Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"				
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	√		Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU				
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		√	Tidak
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		√	Tidak
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		√	Tidak
5	Apakah Nilai SILPA/SikPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		√	Tidak
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?		√	Tidak

LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?		√	Tidak
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		√	Tidak
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		√	Tidak
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		√	Tidak
5	Investasi Jangka Pendek BLU – Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		√	Tidak
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		√	Tidak
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		√	Tidak

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan



Bandung, 17 Januari 2023

Penelaah,

Widha Pulbowati

NIP. 198211172010122001